



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI
 RIAU TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
 MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI
 MASYARAKAT MISKIN DI KOTA
 PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Syarat
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

MIFTAHUL MUHTADIN
NIM : 11720714691

**JURUSAN ILMU HUKUM
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
 RIAU
 2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul ***"Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru."*** yang ditulis oleh:

Nama : MIFTAHUL MUHTADIN
 NIM : 11720714691
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Dzulkaidah 1442 H
 15 Juni 2021 M

Pembimbing Skripsi

RONI KURNIAWAN,SH.,MH
 NIK. 130217086

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU"*

yang ditulis oleh :

Nama : **MIFTAHUL MUHTADIN**
 NIM : 11720714691
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris

Basir, SH., MH

Penguji I

Rudiadi, SH., MH

Penguji II

Dr. Muhammad Darwis., SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



ABSTRAK

Miftahul Muhtadin (2021) : Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa Biro Hukum berwenang : a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Dalam hal ini, pengawasan yang diberikan oleh biro hukum terhadap lembaga bantuan hukum hanya melakukan verifikasi data, yang telah diajukan oleh lembaga bantuan hukum, fasilitas yang diberikan oleh biro hukum hanya berupa uang. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru dan bagaimana hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder serta tersier. Lokasi penelitian berada di Biro Hukum Gubernur Riau dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru dan LBH PAHAM Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang diberikan oleh Biro Hukum Provinsi Riau hanya berupa verifikasi data dan belum terlaksananya pengawasan secara langsung. Hambatan pada LBH YLBHI Pekanbaru yakni tidak semua perkara yang dapat didampingi dan hambatan pada LBH PAHAM Riau yakni terdapat pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, informasi, sosialisasi dan dukungan. Agar berjalannya pengawasan dengan baik dapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau meningkatkan anggaran dalam APBD serta LBH agar lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Pengawasan dan hambatan

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU”**.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Drs. Ramli Husein, M.P dan Ibunda Santi Rahayu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridhanya.

2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Budi Azwar, S.E., M.Ec selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

9. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

MIFTAHUL MUHTADIN
NIM. 11720714691

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penulisan	9
F. Penulisan Terdahulu	10
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	24
B. Sejarah Singkat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	26
C. Visi Dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	26
D. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	27
E. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	29
F. Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerja Sama Dengan	



BAB III

BAB IV

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

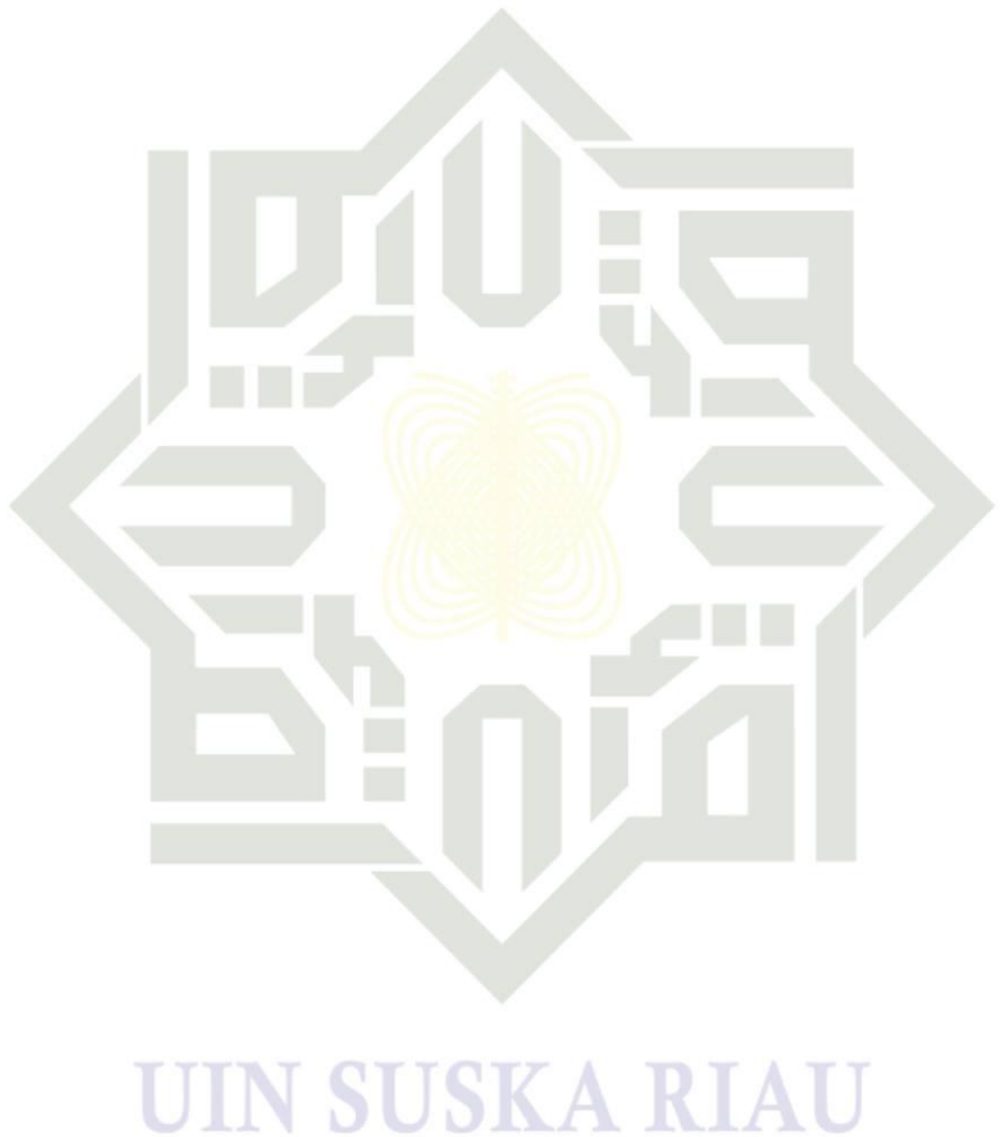
Biro Hukum Provinsi Riau	36
KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Tentang Pengawasan	41
B. Kajian Tentang Bantuan Hukum	48
C. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru	55
B. Hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin	62
PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Informan dalam penelitian	20
---	----



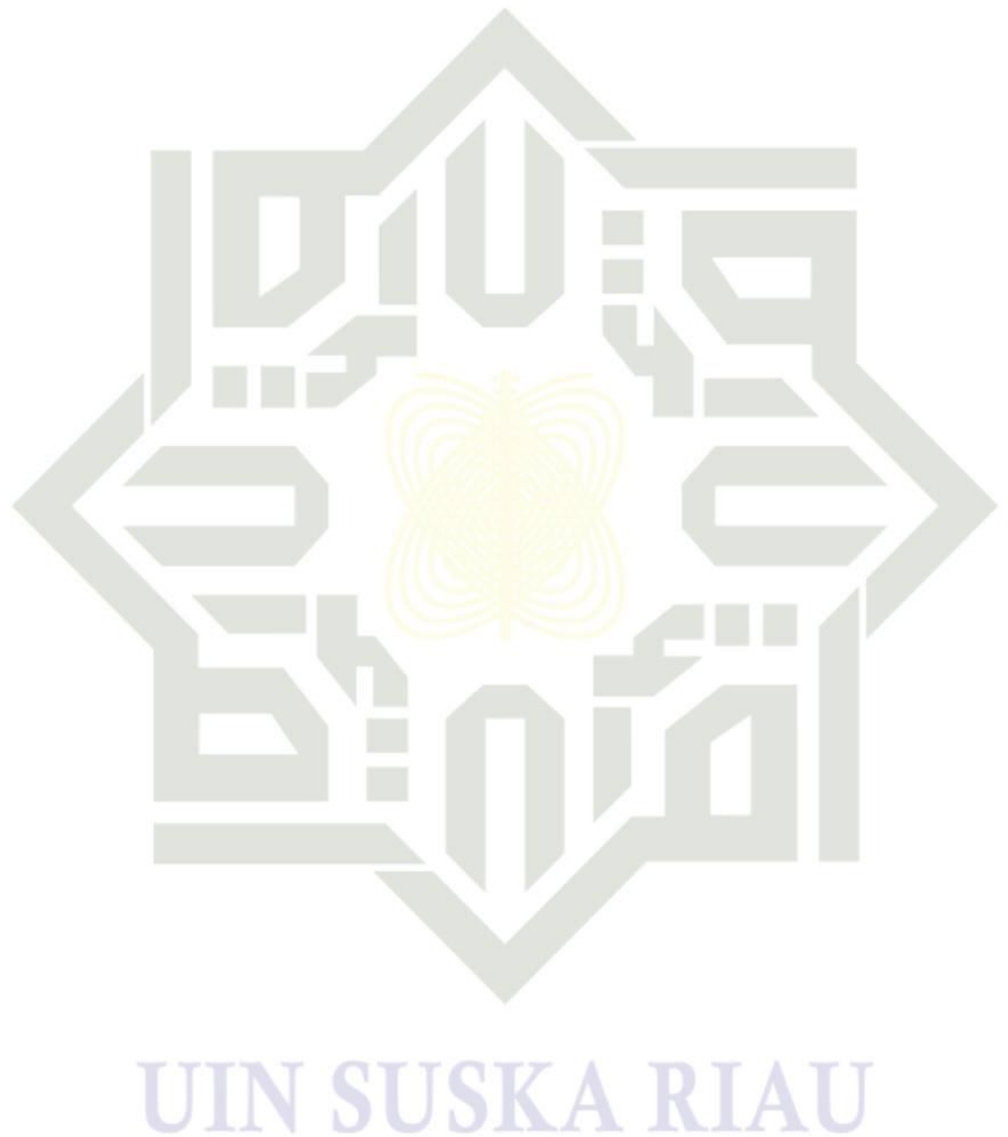
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah

Provinsi Riau 28





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia hukum di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat karena hal ini merujuk kepada kedisiplinan suatu bangsa. Banyak pro dan kontra yang timbul dalam bidang ini, mengenai dampak adil atau tidaknya sebuah hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pembenahan pun tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah, baik dengan cara penambahan aturan-aturan baru maupun menjatuhkan sanksi akan tingkat kedisiplinan yang bertujuan agar terciptanya masyarakat yang patuh hukum. Namun apa yang menjadi tujuan pemerintah seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di kenyataan. Bagaimana tidak, jumlah tindak pidana setiap tahun yang selalu meningkat menggambarkan bahwa hukum di Indonesia sudah tak lagi berdiri kokoh.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang hak memperoleh bantuan hukum yang tertera dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Sedangkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kedua pasal diatas mengarahkan definisi negara juga sebagai pengemban kewajiban memberikan bantuan hukum, khususnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan hak memperoleh bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum untuk sistem peradilan dalam keadaan tertentu dan bagi orang miskin, wajib diberikan oleh Negara.

Bantuan Hukum merupakan sebuah proses pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Namun yang melatarbelakangi masalah bantuan hukum secara luas tidak hanya berputar antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pengaruh pemerintah yang mengatur sistem hukum.

Terkait bagaimana korelasi antara instansi pemerintahan dan lembaga formil yang bekerjasama dengan pemerintahan tersebut.¹ Proses terjadinya pemberian bantuan hukum memang secara formal terjadi mulai dari awal penanganan perkara, hal yang seperti ini akan berlanjut hingga sampai pada saat masyarakat yang bersangkutan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dan hal ini akan berdampak pada timbulnya rasa keadilan setelah proses hukum selesai. Keadilan yang dimaksud bisa berupa pemenuhan hak-hak selama proses hukum berlangsung. Selain itu bantuan hukum juga berfungsi menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya yang timbul apabila berhadapan dengan masalah hukum. Tidak ada yang salah dengan prosedur hukum serta penegakannya namun, seringkali pada kenyataannya proses hukum yang terjadi dilapangan berbeda dengan ketentuan peraturan baku yang sudah menjadi patokan bagi negara.

Rasa tidak adil dari akibat hukum yang ditimbulkan masih sering kali menghinggapinya masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang tergolong kategori

¹ Agus Raharjo, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)* Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, h. 432-444.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Ada dua tujuan pokok yaitu dasar pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin yang lemah dari segi ekonomi dan yang kedua yaitu kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek hukum.²

Maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana membangun atau mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak membela diri atau menuntut haknya dan kepentingannya terutama jika kedudukannya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun seringkali hak tersangka tidak sepenuhnya diberitahukan oleh penegak hukum

Dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Didalam dunia Internasional pasal 56 ayat 1 KUHAP diartikan sebagai miranda rule, yaitu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang Hak-Hak yang harus dihormati oleh penyidik diantaranya:

1. Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.

² Jurnal Konstitusi, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Volume 11, Nomor 2, (Juni 2014), h. 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum atau advokat untuk mendapatkan bantuan hukum.
3. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau advokat.
4. Hak untuk disediakan penasihat hukum apabila tersangka tidak mampu menyiapkan penasihat hukum atau advokat sendiri.

Seluruh masyarakat tentunya mengaharapkan hukum yang adil dan pasti seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hal ini menegaskan bahwa semua orang harus mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Salah satunya adalah hak mendapatkan pembelaan dan atau pendampingan saat proses hukum berlangsung. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diatur tentang bagaimana bantuan hukum itu diberikan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat yang sedang berperkara untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah dan yang telah diatur dalam Undang-Undang.³ Hal ini juga bertujuan guna membantu masyarakat yang buta hukum agar dapat memperoleh keadilan. Sebagai penyeimbang antara hukum dan rasa adil timbulah proses pemberian bantuan hukum. Namun seringkali proses bantuan hukum yang dilaksanakan tidak sejalan dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang serta peraturan terkait.

³ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi seperti ini seringkali mengundang pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa penegakkan hukum tidak benar-benar dilaksanakan mengingat proses untuk mendapatkan bantuan hukum yang sulit. Mengakibatkan kebanyakan dari masyarakat yang sedang berperkara diranah hukum, seolah tidak peduli dengan prosedur hukum yang didalamnya terdapat pemberian bantuan hukum. Diabaikannya proses pemberian bantuan hukum ini juga tak lepas dari campur tangan para aparat penegak hukum yang memberitahukan keberadaan bantuan hukum yang bisa dimanfaatkan masyarakat pada saat proses hukum berlangsung.⁴ Berbeda ketika masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pada saat proses hukum berlangsung.

Fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan bantuan hukum dalam rangka persamaan kedudukan dihadapan hukum seperti tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Atas dasar pertimbangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Program bantuan hukum dapat diberikan tanpa pungutan biaya, merupakan tanggungjawab negara sesuai pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari

⁴ Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), h. 107.



fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin adalah tugas dan tanggung jawab negara.⁵

Di dalam penegakkan hukum sebenarnya ada kewajiban pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mempergunakan wewenangnya sebagai penegak hukum terutama bagi masyarakat miskin, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang berbunyi “*pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan*”. Mengacu dari bunyi pasal diatas, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dituliskan bahwa “*dalam penyelenggaraan bantuan hukum Gubernur menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Kerjasama yang dibuat antara Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dengan Lembaga Bantuan Hukum merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

Bantuan Hukum merupakan sebuah proses pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Namun yang melatarbelakangi masalah bantuan hukum secara luas tidak hanya berputar antara penegak hukum dan subjek hukumnya saja, namun juga pengaruh pemerintah yang mengatur sistem hukum. Terkait bagaimana korelasi antara instansi pemerintahan dan lembaga formil yang bekerjasama dengan pemerintahan tersebut. Proses terjadinya pemberian bantuan hukum memang

⁵ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

acara formal terjadi mulai dari awal penanganan perkara, hal yang seperti ini akan berlanjut hingga sampai pada saat masyarakat yang bersangkutan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁶

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Pasal 9 ayat (1), *Biro Hukum berwenang : a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.*

Berdasarkan uraian dalam “Latar Belakang” diatas, penulis ingin melakukan penulisan tentang “Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru” dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa masih banyak ditemukannya masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum namun tidak didampingi oleh penasihat hukum.
2. Bahwa kebijakan tentang kewajiban memberikan bantuan hukum merata kepada setiap masyarakat yang berperkara, belum sepenuhnya dilaksanakan.
3. Bahwa Biro Hukum Provinsi Riau belum sepenuhnya mengawasi dan memastikan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah nomor 3 tahun 2015

⁶ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Surabaya: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masih sedikitnya lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Riau
5. Masih sedikitnya anggaran APBD untuk Lembaga Bantuan Hukum

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu, Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Dan Hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.

E. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Manfaat Teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran metode penulisan hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya terhadap Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang berperkara dan juga mengetahui hambatan-hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin.

- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Dapat diketahui penerapan pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Lembaga Bantuan Hukum

F. Penulisan Terdahulu

Landasan atau acuan dasar penulisan adalah, pertama yaitu skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Dalam Perjuangan Pelaksanaan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kabupaten Batang)” oleh Dian Pramita Sari, S.H dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2011. Dalam skripsi ini penulis terdahulu menfokuskan pada masalah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang dan upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan terdahulu yang kedua yaitu dalam skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dalam Perkara Pidana Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang” oleh Rugun Romaina Hutabarat, S.H dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2013. Dalam skripsi ini penulis lebih fokus kepada kinerja Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana dan peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum yang struktural.

Penulisan terdahulu yang ketiga yaitu dalam naskah disertasi yang berjudul “Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional”, oleh Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H dari Universitas Padjadjaran Tahun 2007. Dalam naskah disertasi ini penulis terdahulu lebih fokus pada bagaimana implementasi hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam praktik peradilan dan bagaimana konsep bantuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin dalam pembangunan hukum nasional.

G. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proses yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting untuk sebuah masalah (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting untuk sebuah masalah.⁷

Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlunya sebuah kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk mendapatkan konsep yang baik dan benar serta tepat sasaran dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Pengawasan

Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi negatif atau tidak menyenangkan karena dengan pengawasan dianggap akan mengancam kebebasan dari pribadi seseorang. Padahal setiap organisasi memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan.⁸ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang biasa disebut dengan controlling. Pengawasan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang telah dibuat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Weihrich dan Koontz, pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengukur dan melakukan

⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-3, (Bandung: Refika Aditama, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koreksi atas kinerja. Hal tersebut merupakan upaya yang sedang dilakukan dalam rangka meyakinkan atau memastikan tercapainya tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin, serta menyingkap kesalahan maupun penyelewengan dan memberikan tindakan korektif.⁹

Dengan begitu, pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan rencana dan dapat mengurangi atau mencegah adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan serta memberikan tindakan korektif.

Adapun sifat pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan program, menilai, menganalisis dan mengoreksi yang telah dilaksanakan untuk disesuaikan dengan standart pencapaian yang telah ditetapkan dan memiliki kecenderungan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan hasil yang diinginkan oleh organisasi.¹⁰ Dengan begitu, kegiatan pengawasan berkaitan erat dengan kegiatan perencanaan karena perencanaan merupakan langkah awal kegiatan pengawasan.¹¹ Kegiatan pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan

⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179

¹⁰ Umiarso Sukarji, *Manajemen Dalam Pendidikan Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 99

¹¹ Ais Zakiyudin, *Teori dan praktek manajemen*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan, ditetapkan, dan dirinci menjadi program dan rencana kerja. Dengan begitu, seorang manajer tidak akan dapat mengamati penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional dan mengukur hasil yang dicapai oleh para sumber daya manusianya tanpa adanya perencanaan. Semakin jelas, lengkap, konkret, dan faktual sebuah perencanaan yang telah disusun, maka semakin mudah pula untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan. Kegiatan perencanaan dan pengawasan dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang karena pelaksanaan perencanaanlah yang diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan yang disengaja maupun tidak.¹² Fungsi pengawasan juga berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian dan pengarahan. Fungsi pengawasan digunakan sebagai penilai atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, maupun pengarahan.¹³ Hal tersebut juga disepakati oleh para ilmuwan bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh manajemen dan proses administrasi.¹⁴

2. Bantuan Hukum

¹² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), h.

¹³ Ais Zakiyudin, *loc.cit.*

¹⁴ Sondang P. Siagian, *op.cit*, h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya. Menurut C.A.J Crulbantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.¹⁵

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:

- a. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.
- b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses

¹⁵ Abdurrahman, , *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.

- c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayahwilayah yang sulit dijangkau.
- d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
- e. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
- f. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.¹⁶

2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis ingin mengetahui bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerjasama.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁸ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,

¹⁸ *Ibid*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁹

Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan LBH yang bekerjasama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012), h. 55.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

Tabel I.1
Informan dalam penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	M. Irsadul Afkari	Kasubbag Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
2.	Noval Setiawan	Kabag Ekosob LBH YLBHI
3.	Alfikri	Direktur LBH PAHAM RIAU

Sumber data : Penelitian 2021

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,²⁰ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum yang telah bekerjasama.

²¹ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2014), h.53.



Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu-persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran lokasi penelitian, yang berada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru.

BAB III: KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan di uraikan teori-teori tentang pengawasan, bantuan hukum dan bagaimana rakyat miskin mendapat kan hak hak nya di mata hukum, di uraikan dalam pembahasan Peraturan Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. meliputi pembahasan pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dan hambatan-hambatan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 derajat 18'-101 derajat 36' bujur timur dan 0 derajat 25'-0 derajat 45' lintang utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup strategis sebagai Ibu Kota Provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Secara geografis Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara Sungai Siak dan wilayah selatan Sungai Siak. Sebagian besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan Sungai Siak. Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-50 m dari permukaan laut. Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang rata-rata 0-2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%. Daratan rendah sebagian besar berada pada bagian selatan Sungai Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagian yang bergelombang terletak pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian selatan Sungai Siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang.

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1244 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

B. Sejarah Singkat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Biro hukum merupakan salah satu perangkat daerah lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan di jabarkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Riau Unit Kerja Biro Hukum bertempat di lingkungan Kantor Gubernur Riau yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Lantai II (dua) gedung lama. Dengan pimpinan oleh seorang Kepala Biro.

C. Visi dan Misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Visi :

"Menjadi Yang Terdepan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Mewujudkan Kepastian Hukum, Melakukan Pengawasan, Penataan Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah yang berkualitas"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi :

Berdasarkan Visi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, maka

selanjutnya ditetapkan 4 (empat) misi Biro Hukum yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah, naskah hukum dan pengembangan jaringan dokumentasi hukum;
- 2) Mewujudkan kepastian hukum, Hak Asasi Manusia dan kerjasama daerah;
- 3) Meningkatkan pengawasan; dan
- 4) Meningkatkan penataan dokumentasi dan naskah hukum daerah yang berkualitas.

D. Struktur Organisasi Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi yang bergerak di Biro Hukum memiliki struktur dan organisasi. Dengan Struktur Organisasi yang ada memudahkan untuk memisahkan fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang bekerja.

Gambar II.1

Struktur Organisasi Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau



Adapun keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Gubernur Bagian Biro Hukum yang merupakan penjelasan rinci dari bagan organisasi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Biro Hukum : ELLY WARDHANI , SH, MH
- 2) Kabag. Perundang-undangan Prov : ARMANITA, SH, M.Si
- 3) Kabag. Perundang-undangan Kab/Kota: WAN MULKAN, SH, M.Si
- 4) Kabag. Bantuan Hukum : YAN DHARMADI, SH, MH
- 5) Kasubbag Naskah Hukum : DRS. SYAFULLAH, M.Si
- 6) Kasubbag Penyusun Produk Hukum Pengaturan : ARIF RAHMAN, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 7) Kasubbag Produk Hukum Daerah Wilayah I : RAJA SYAIFUL, SH
- 8) Kasubbag Non Litigasi dan HAM : NANDI TRIAZANOVI, SH
- 9) Kasubbag Penyusun Produk Hukum Penetapan : SABRIODA, SH
- 10) Kasubbag Produk Hukum Daerah Wilayah II : SUSANTY, SH
- 11) Kasubbag Litigasi : IRSADUL AFKARI, SH, MH
- 12) Kasubbag Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya : DRS. H. SYAIFULLAH, M.Si
- 13) Kasubbag Produk Hukum Daerah Wilayah III : RITA AFRIANI, SH.M.Si
- 14) Kasubbag Tata Usaha Biro : NORIZAL, SE

E. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Adapun alur tupoksi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau menurut Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

1. Kepala Biro Hukum

- a) Kepala Biro Hukum mempunyai tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif pada Bagian Perundang-Undangan, Bagian Bantuan Hukum, dan Bagian Dokumentasi Fasilitasi, dan Evaluasi
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Biro Hukum menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro Hukum

2. Kepala Bagian Perundang-Undangan

- a) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Peraturan Daerah, Subbagian Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dan Subbagian Naskah Hukum Lainnya.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bagian Menyelenggarakan Fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Perundang-Undangan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bagian perundang-undangan;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Hukum; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bagian Bantuan Hukum

- a) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Litigasi, Subbagian Non Litigasi dan Subbagian Hak Asasi Manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bagian menyelenggarakan fungsi;
- c) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Bantuan Hukum;
- d) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Bantuan Hukum;
- e) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Hukum; dan
- f) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pemimpin sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Litigasi

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Litigasi;
- b) Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Litigasi;
- c) Menerima/membuat gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi;
- d) Melakukan mediasi di pengadilan;
- e) Mewakili pemerintah daerah dalam beracara di pengadilan;
- f) Melakukan penyelesaian perkara di pengadilan terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi pada pemerintah daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Mempersiapkan upaya banding, serta memori banding/kontra memori banding;
- h) Menghadiri sidang lapangan;
- i) Mempersiapkan upaya banding, serta memori kasasi/kontra memberi kasasi;
- j) Melakukan upaya kasasi, menyiapkan memori kasasi/kontra memori kasasi;
- k) Melakukan upaya hukum peninjauan kembali;
- l) Menginventarisasi perkara-perkara perdata dan tata usaha negara yang di tunjukkan kepada pemerintahan provinsi;
- m) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang hukum;
- n) Pembinaan administrasi dan aparatur di bidang hukum;
- o) Melakukan konsultasi dan koordinasi ke departemen atau lembaga Non Departemen yang terkait dengan perkara, bila diperlukan;
- p) Mengadakan rapat atau koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas perkara yang sedang berjalan;
- q) Menyusun jawaban judicial review dan uji materiil;
- r) Membuat surat tentang persetujuan Gubernur Riau atas pemanggilan penyidik dan meneliti kelengkapan administrasi pengganti antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s) Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan konsultasi, advokasi atau nasehat dan pendampingan penyelesaian permasalahan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
- t) Memberikan konsultasi Hukum, Memberikan advokasi atau nasehat hukum, dan memberikan pendampingan hukum pada Aparatur Sipil Negara;
- u) Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan hukum;
- v) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Litigasi; dan
- w) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atau sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Subbagian Non Litigasi

- a) Merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Non Litigasi;
- b) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Non Litigasi;
- c) Memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya;
- d) Melakukan mediasi di luar pengadilan;
- e) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan Non Litigasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menyusun rencana kerja bagian dengan cara mempedomani kegiatan tahun lalu dan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hukum;
- h) Melakukan pembinaan administrasi dan Aparatur di Bidang Hukum;
- i) Melakukan konsultasi dan koordinasi ke kementerian atau lembaga Non kementerian yang terkait dengan permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan;
- j) Mengadakan rapat/koordinasi dengan instansi terkait/untuk membahas pengaduan masyarakat;
- k) Menyiapkan bahan-bahan dan data serta sumber daya manusia dalam rangka menginventarisir lembaga konsultasi dan bantuan hukum;
- l) Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan perlindungan dan pengendalian permasalahan hukum bagi anggota korp pegawai Republik Indonesia;
- m) Menyusun, mengajukan rencana kerja dan anggaran perlindungan dan pengendalian Hukum dengan mempedomani rencana kerja tahunan dan petunjuk atas atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakn inventarisasi dan pendataan permasalahan hukum di luar kedinasan dengan cara berkoordinasi dengan instasi terkait untuk mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan masalah hukum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o) Melaksanakan perlindungan hukum pada anggota menyiapkan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan perlindungan dan pengendalian permasalahan hukum bagi anggota korp Pegawai Republik Indonesia;
- p) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Non Litigasi; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atas sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro

- a) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d) Melaksanakan pengelolaan ke arsip biro;
- e) Melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan kegiatan biro;
- f) Penyiapan bahan administrasi kepegawaian biro;
- g) Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h) Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- i) Penyiapan bahan administrasi keuangan dan aset biro;
- j) Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- k) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga biro;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi biro;
- m) Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- n) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategi Biro;
- o) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- p) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerjasama Dengan Biro Hukum Provinsi Riau

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Visi :

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

b. Misi :

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Su

Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.²²

Mengenai lingkup kerja YLBHI-LBH Pekanbaru meliputi wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.²³ Serta bekerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Riau.

2. PAHAM Indonesia

Peristiwa atau sejarah pergulatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang memamerkan ketidakadilan, seperti kasus yang terjadi di Aceh, Lampung, Maluku, Tanjung Periuk dan diberbagai daerah lainnya, untuk satu kasus pidana yang sama tapi terjadi perlakuan yang berbeda, untuk status kewarganegaraan yang sama diberi perlakuan dengan berbeda, pendek kata keadilan belum merata bagi Insan Indonesia, akhirnya beberapa generasi muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara bersama-sama mendirikan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indoensia pada 15 Mei 1999.

PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (certainty of law) dan kesamaan di depan hukum (equality before the law), menegakkan hak

²² <https://ylbhi.or.id/profil/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 27 Februari 2021 jam 20.45 WIB.

²³ <https://www.lbhpekanbaru.or.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2021 jam 21.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Suran Syarif Kasim Riau

asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/ bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum.

Sejak tahun 2013 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah salah satu dari banyak Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Saat ini Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia telah tersebar lebih dari 20 daerah di seluruh Indonesia.

a. Visi :

Bahwa Keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada pembedaan sedikitpun (justice for all). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan kepastian hukum (certainty of law).

b. Misi :

Menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.²⁴

²⁴ <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021 jam 10.00 WIB



BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawasan adalah aktivitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktivitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁵ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, pengawasan didefinisikan sebagai berikut :²⁶ Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.

²⁵ Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2011), h.15

²⁶ <https://jurnal.manajemen.com> diakses tanggal 12 Maret 2021 jam 15.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁷

b. Prinsip pengawasan

Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut :²⁸

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- 2) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah

²⁷ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta : Kalam Indonesia, 2006), h.15

²⁸ Ibid., h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

- 3) Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

c. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan masing-masing.
- b. Sebagai penilai terkait pengontrol aktivitas pengelolaan sumber daya air apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif.
- c. Pemantauan aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya air.

d. Tujuan pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

²⁹ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 2001),h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi
- e) Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- f) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.

e. Jenis – jenis pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yaitu sebagai berikut :

1) Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

2) Pengawasan preventif atau represif

Pengawasan preventif atau represif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk pengawasan yang dilakukan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan.

3) Pengawasan aktif atau pasif

Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4) Pengawasan kebenaran formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan memeriksa kebenaran materil terkait tujuan dilakukannya pengeluaran. Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara berkelanjutan dengan interval waktu tertentu atau berkala dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan. Sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.³⁰

³⁰ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Perumahan Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007),h. 29

f. Metode Pengawasan

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.³¹

2) Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3) Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan

³¹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghailia Indonesia : 2004), h, 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4) Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5) Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.³²

B. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

Istilah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah istilah resmi yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia terhadap orang yang berhak memberikan Bantuan Hukum serta Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.³³

Menurut Abdulrahman ada beberapa istilah yang terkait dengan bantuan hukum, seperti dilihat di bawah ini:³⁴

³² *Ibid*, h, 67.

³³ Abdulrahman, *op.cit*

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Legal Aid*: Bantuan hukum berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat sebuah kasus. Jasa yang dimaksud seperti:
 - a. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.
 - b. Bantuan hukum dalam Legal Aid lebih di khususkan pada masyarakat tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - c. Dengan demikian konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan cara mementingkan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum.
2. *Legal Assistance*: Bantuan hukum mengandung pengertian lebih luas dari Legal Aid karena pada Legal Assistance disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, namun juga lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi Advokat dalam memberi bantuan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Baik bagi masyarakat yang mampu membayar prestasi.
 - b. Maupun pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin secara cumacuma.
3. *Legal Service*: Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Pelayanan Hukum”. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengartian yang lebih luas kepada konsep dan makna Legal Service dibandingkan dengan 14 konsep Legal Aid dan Legal Assistance, karena pada konsep dan ide Legal Service terkandung makna dan tujuan:
 - a. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang oprasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan rakyat miskin.

- b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan yang miskin.
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan untuk setiap orang, Legal Service operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh perdamaian.

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan nafas yang menjadi tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu :³⁵

- a. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.

³⁵ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 1-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.
- c. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
- d. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat miskin menyadari hak-haknya dan mengklaimnya.
- e. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik.
- f. Masih berjalan sendiri, tidak bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik.
- g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.

Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah adalah :

- a) Mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD;
- b) Melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, yang hendak mengakses anggaran bantuan hukum tingkat provinsi.

- c) Menerima pengajuan pencairan anggaran bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum atau secara manual dengan diserahkan dokumen pelaksanaan bantuan hukumnya kepada pemerintah daerah, apabila belum terhubung dengan Sidbankum;
- d) Melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
- e) Melakukan pencairan dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.
- f) Menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di wilayah provinsi.³⁶

C. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang dimaksud dengan daerah adalah Provinsi Riau, sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau, untuk Fasilitasi Bantuan hukum adalah pelayanan di bidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Serta Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Panduan Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan Tifa, 2018) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Provinsi Riau baik secara individu maupun kelompok.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, pada pasal 3 berbunyi, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota warga miskin di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- d. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi Riau; dan
- e. Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pada Pasal 5 berbunyi :

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan hukum.

Pada Pasal 9 berbunyi :

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Biro Hukum berwenang :
 - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Setelah terjalinnya kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, disinilah timbul perspektif tentang efektivitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengawasan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru telah terlaksana dalam perihal pemberian dana bantuan hukum kepada masyarakat dengan nominal Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) sesuai dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium Jasa Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau di Pengadilan dalam Pasal 2. Namun pengawasan yang diberikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau hanya berupa verifikasi data dan belum terlaksananya pengawasan secara langsung turun ke lapangan mengawasi pemberian bantuan hukum untuk memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Hambatan Lembaga Bantuan Hukum pada YLBHI Pekanbaru yakni tidak semua perkara yang dapat didampingi dikarenakan adanya



pembatasan kuota yang telah disediakan dalam pemberian bantuan hukum berupa dana yang juga telah ditetapkan. Adapun hambatan yang terdapat pada LBH PAHAM Riau seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), anggaran, informasi yang didapat terkait kasus-kasus yang perlu bantuan hukum, sosialisasi kepada masyarakat dalam hal bantuan hukum serta akreditasi dari LBH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau terhadap Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau lebih meningkatkan anggaran dalam APBD, mengingat agar Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan kuota lebih dan masyarakat miskin dapat lebih banyak terbantu.
2. Sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum dapat meningkatkan kinerja dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Abdul Rachman, Arifin, 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Al-Amin, Mufham, 2006, *Manajemen Pengawasan*, Jakarta : Kalam Indonesia.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir, , 2005, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Handoko, T. Hani, 1999, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Hajar M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad, 2006 *Manajemen Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- rsyah, Moh. Thamrin dan Moh. Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, Yogyakarta: LBH Yogyakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, *Panduan Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yayasan Tifa.
- Lubis, Todung Mulya, 1983, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Cendana Press.
- Maulan, Arif, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin*, Jakarta: Subur Indo Grafika.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Noor, Juliansyah, 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana Perdana Media Grup.
- P. Siaagian, Sondang, 2012, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Pramudyanto, Hamrat Hamid dan Bambang, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Granit, 2007.
- Rahanto, Adisasmita, 2011, *Manajemen Pemerintah*, Yogyakarta : Graha ilmu.
- Silalahi, Ulber, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-3, Bandung: Refika Aditama.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sukarni, Umiarso, 2014 *Manajemen Dalam Pendidikan Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Widyadharma, IGN. Ridwan, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Winarta, Frans Hendra, 2007, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang: Universitas Padjajaran.

Zakiyudin, Ais, 2013, *Teori dan praktek manajemen*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Honorarium Jasa
Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Se Provinsi Riau
Di Pengadilan



JURNAL DAN ARTIKEL

Agus Raharjo, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat*) Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Ferry Angriawan dan Dyah Mutiarin, Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh Pedagang UMKM di Kota Pekanbaru, Vol. 3, No. 1, April 2019.

Jurnal Konstitusi, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

<https://www.lbhpekanbaru.or.id/category/catatan-akhir-tahun>

<https://ylbhi.or.id/profil/visi-dan-misi/>

<https://www.lbhpekanbaru.or.id/>

<https://jurnal.manajemen.com>

<https://jdih.riau.go.id/>

<https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

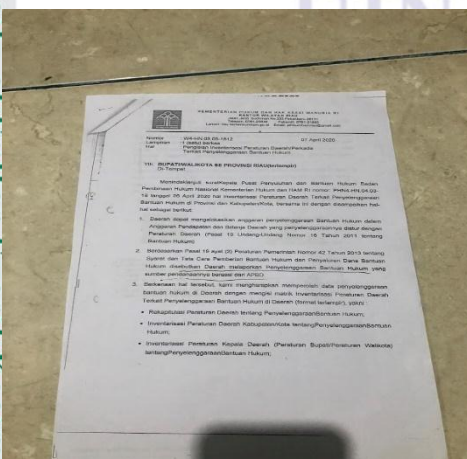
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Bersama M.Irsadul Afkari,SH, MH selaku Kasubbag Litigasi di Biro Hukum Provinsi Riau, tanggal 29 Maret 2021 di Kantor Gubernur Provinsi Riau.



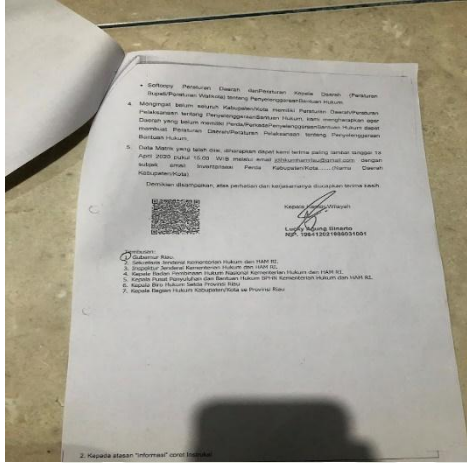


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAGA / ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMERIKSA BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019 S.D. 2021

No	Daerah
1.	Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru
3.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas LancangKuning
4.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mahatva
5.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda
6.	Yayasan forum masyarakat madani Indonesia
7.	LBH tuah negeri nusantara
8.	Posbakum adin siak
9.	Posbakum adin pelalawan
10.	Ylbh sahabat keadilan rohul

Data-data yang di berikan dari pihak biro hukum

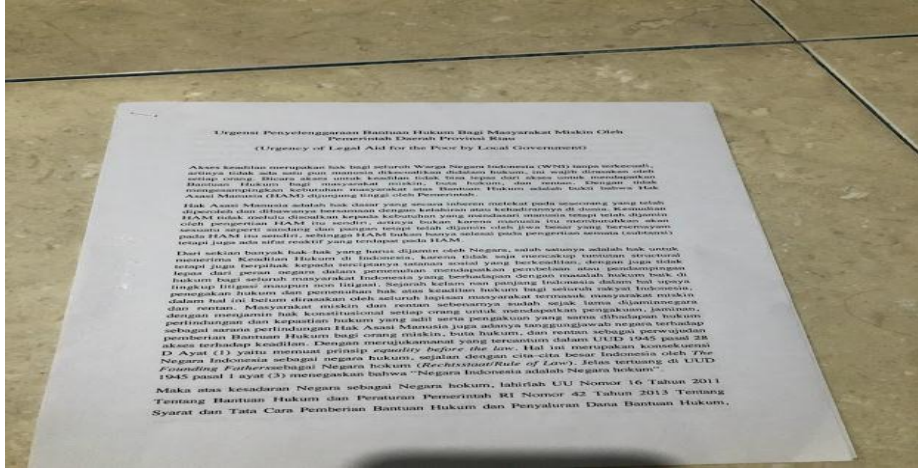
UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data Yang Di Berikan Pihak Lbh (YLBHI)



Wawancara Alfikri, SH, Direktur PAHAM RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN BIRO HUKUM PEMERINTAHAN
PROVINSI RIAU TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU"*

yang ditulis oleh :

Nama : **MIFTAHUL MUHTADIN**
NIM : 11720714691
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Rudiadi, SH., MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis., SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

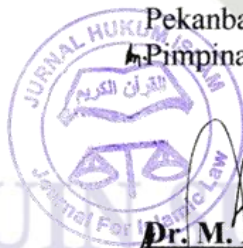
Nama : Miftahul Muhtadin
NIM : 11720714691
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Pengawasan Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru

Pembimbing : Roni Kurniawan, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

n.04/F.I.1/PP.00.9/6364/2020

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Di
Jasa

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada
th.

Biro Hukum Provinsi Riau

Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MIFTAHUL MUHTADIN
NIM : 11720714691
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2020
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP.19580712 198603 1 005

© Hak Cipta, Diindungi Undang-Undang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 18 Maret 2021

: Un 04/F.I/PP.00.9/3007/2021

: Biaya

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MIFTAHUL MUHTADIN
NIM	: 11720714691
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Biro Hukum Provinsi Riau dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pengawasan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Tak dapat Dilindungi Undang-Undang

Di rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di rang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39905
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penunjukan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
UIN 04/F/PP.009/3007/2021 Tanggal 18 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIFTAHUL MUHTADIN |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714691 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU TERHADAP LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU
2. LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Maret 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. KEPALA BIRO HUKUM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU
3. PIMPINAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Farisi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Miftahul Muhtadin, lahir di Pekanbaru pada tanggal 15 juni 1999, Anak ketiga dari tiga bersaudara dari bapak Ramli Husin dan ibu Susanti Rahayu. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 004 Pada tahun 2011, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada SMP Islam As-Shofa 2014 dan pada tingkat Sekola Menengah Atas Pada MAN 1 Pekanbaru Pada Tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pada tahun 2017 dengan Jurusan Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 11720714691.

Untuk lebih mendalami secara praktis mengenai penulis melakukan praktek kerja lapangan (magang) pada instansi Biro Hukum Provinsi Riau pada tahun 2019 dan di fokuskan pada bagian bantuan hukum dan melakukan kuliah kerja nyata pada tahun 2020 di sungai duku Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Sebagai Mahasiswa, Penulis tentu saja harus menyelesaikan kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) yang sudah lama diimpikan. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU, Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Biro Hukum Provinsi Riau Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru”. Penulis dinyatakan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Melalui sidang Munaqsyah Jurusan Ilmu Hukum , fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada tanggal 01. Juni 2021.